

**KETERLIBATAN INGGRIS DALAM UPAYA
PENYELESAIAN PERANG SOMALIA TAHUN 2006-2009**

RESUME



Oleh:

Angling Taufeni
151 040 132

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"**

YOGYAKARTA

2011

KETERLIBATAN INGGRIS DALAM UPAYA PENYELESAIAN PERANG SOMALIA TAHUN 2006-2009

Perkembangan dunia ternyata tidak bisa lepas dari konflik. Salah satunya adalah Perang Somalia. Konflik ini sebenarnya pecah pertama kali pada tahun 1991. Perang ini terus fluktuatif (pasang surut) dan puncaknya terjadi pada tahun 2006 yang menyebabkan korban ribuan orang, termasuk didalamnya perempuan dan anak-anak. Masalah ini kemudian menjadi perhatian masyarakat Internasional, termasuk PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Dalam menangani konflik di Somalia, Dewan Keamanan PBB kemudian membentuk misi khusus yaitu *United Nations Operation In Somalia* (UNOSOM). Sampai dengan 2006 ternyata misi ini banyak menuai kegagalan, yang dapat dilihat dari terus berlangsungnya konflik, serta belum ditemukannya "*win-win solutions*" antara pihak-pihak yang bersengketa. Inilah yang menjadi awal dari peran dan campur-tangan Inggris dalam ikut menyelesaikan masalah ini.

Masalah ini menyebabkan dampak yang luar biasa, yaitu korban jiwa dalam jumlah yang besar, pelanggaran

terhadap demokrasi dan HAM, serta tidak jelasnya masa depan negara ini akibat konflik yang berlangsung secara berkepanjangan karena pecah pertama kali pada tahun 1986 dan sampai tahun 2006 masih terus berlangsung meskipun kadang mengalami masa jeda dan kemudian terjadi kembali.

Perang Somalia sebenarnya melibatkan banyak pihak, namun secara faktual terdapat dua kelompok besar yang masing-masing saling bersengketa yaitu kubu pemerintah yang disebut dengan TFG (*Transitional Federal Government*) atau *Warlord* dan kubu pemberontak yang dimotori oleh ICU (*Islamic Court Union*).

Warlords adalah sebuah forum komunikasi para mantan perwira tinggi militer di suatu negara untuk kemudian berupaya menjalankan atau melakukan pendekatan-pendekatan pada rezim yang berkuasa di suatu negara. Umumnya *Warlords* berupaya menjalankan sistem pemerintahan suatu negara karena masalah stabilitas keamanan yang tidak kondusif atau bahkan terancam.

ICU (*Islamic Court Union*) merupakan organisasi yang dirintis dan berkembang pada tahun 1991 bersamaan dengan runtuhnya pemerintah Somalia pada tahun yang sama. Pasca runtuhnya negara ini sistem syariah begitu mendominasi

percaturan sosial-politik di Somalia, yang kemudian berkembang menjadi sebuah sistem peradilan dan kenegaraan

Kedua pihak ini berseteru dalam memperebutkan pengaruhnya di Somalia, di satu sisi TFG dianggap sekuler, oleh ICU, sedangkan bagi TFG, ICU merupakan kelompok radikal yang harus diperangi.

Kompleksnya perang sipil di Somalia kemudian mendorong pihak-pihak Internasional untuk berpartisipasi dalam menangani masalah ini. Salah satunya adalah Inggris. Bagi Inggris, Somalia memiliki peranan penting karena merupakan bagian dari keanggotaan Persemakmuran Inggris (*British Commonwealth*) yang apabila dibiarkan maka ini akan mengganggu stabilitas wilayah Afrika.

Keterlibatan Inggris di Somalia pertama kali diwujudkan tahun 2006 dan hingga 2009 peran Inggris dalam ikut mendukung penyelesaian masalah ini telah membuahkan hasil yang signifikan. Peran Inggris ini ternyata diwujudkan melalui koordinasi dengan NATO dan PBB.

Koordinasi dengan NATO memiliki peranan penting bagi Inggris. Organisasi ini memiliki kredibilitas yang baik dan teruji dalam program-program pertempuran di beberapa wilayah dunia. Beberapa misi penting yang

berhasil dijalankan atas koordinasi dengan NATO adalah pembentukan sistem pengamanan bersama, *joint task force*, evakuasi medis bersama dan operasi tempur bersama melalui program ASS (*Assistance Force of Somalia*). Program ini diratifikasi pada 20 Desember 2001 di Bonn Jerman, dengan total pelibatan jumlah personel sejumlah 55.100 orang.

Keberadaan NATO di Somalia ternyata juga berkaitan dengan misi Inggris. Dengan kata lain, Inggris menjalankan bentuk-bentuk koordinasi dengan aktor Internasional lainnya karena selain menggunakan NATO sebagai organisasi partisipan, Inggris juga menjalankan perannya secara independen. Tindakan ini dikemukakan oleh pejabat Inggris urusan keamanan Afrika Bruce William.

Program ASS berisi beberapa program ketentuan, masing-masing yaitu:

- a. Mengamankan wilayah-wilayah di seluruh Somalia melalui pengedepanan tindakan-tindakan persuasif.
- b. Melucuti persenjataan milisi-milisi di Somalia yang bersengketa, yaitu milisi-milisi yang tergaung dalam ICU.

- c. Mendukung pemerintahan formal yang demokratis, yaitu kubu pemerintah transisi (TFG) di bawah kepemimpinan Sharif Sheik Ahmed.
- d. Mendukung stabilitas perekonomian melalui pendekatan stabilitas keamanan bersama-sama dengan mediasi Internasional.

Melalui koordinasi dengan NATO berhasil membentuk tim-tim yang berguna mewujudkan peacekeeping di Somalia, antara lain tim demolisi, peninak bahan peledak dan SAR. Keberadaan tim-tim ini memiliki peranan penting selain untuk mendukung pencapaian keamanan, juga sebagai substitusi kinerja pemerintah Somalia (TFG) yang terkadang tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat Somalia.

Kemudian obyek koordinasi yang dijalankan oleh Inggris lainnya adalah dengan PBB. Wujud koordinasi ini lebih menekankan pada mekanisme non-tempur, sebagai contoh adalah bantuan kemanusiaan, kesehatan terutama koordinasi pembangunan dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan millennium (MDG's).

Keterlibatan Inggris lainnya diwujudkan melalui bantuan teknis. Ini dimaksudkan Inggris sebagai wujud pencapaian *peacebuilding*, yaitu pemulihan konflik melalui

pembangunan-pembangunan infrastruktur dasar dan dukungan sistem pelaporan pasca peran UNOSOM ataupun melalui operasi "United Shield" bersama-sama negara-negara internasional lainnya.

Kemudian wujud fasilitasi operasional diwujudkan oleh Inggris dengan program pengamanan perairan bersama. Sebagai contoh tentang hal ini adalah pembangunan pos-pos pengamanan dan terlibat dengan pasukan multinasional di beberapa wilayah Somalia, dari ibukota Mogadishu hingga Beleyweine. Sejak tahun 2006 pos-pos yang dimiliki oleh Inggris sebanyak 5 unit, masing-masing yaitu:

- a. Pos I di Timur Mogadishu yang terdiri dari 10-12 personel pasukan multinasional.
- b. Pos II di Barat Laut Puntland yang terdiri dari 10-12 personel pasukan multinasional.
- c. Pos III di Barat Kismayo yang terdiri 18-20 orang personel pasukan multinasional.
- d. Pos IV di Utara Beleyweine yang terdiri 18-20 orang personel pasukan multinasional.
- e. Pos Induk sebagai pusat komando operasi taktis yang terletak di jantung kota ibukota Mogadishu yang

terdiri dari komandan staf kecil dengan 20 orang anggota.

Keberadaan pos-pos pengawasan tersebut memiliki peranan penting untuk mengawasi konflik secara langsung, memberikan pelayanan terhadap masyarakat sipil dan koordinasi bagi para sukarelawan (*international volunteer*) dan palang merah internasional.

Selain itu, Inggris juga berhasil membentuk unit-unit sub-satgas yang memiliki kemampuan secara khusus. Pembentukan unit-unit sub-satgas ini terbagi atas tiga kelompok, masing-masing yaitu:

- a. Kelompok 1 yang memiliki kemampuan penguasaan teknis, penjinakan bahan peledak, peta tempur dan navigasi.
- b. Kelompok 2 yang memiliki kemampuan lobi-lobi, negosiasi dan kemampuan non-teknis tempur (kesehatan dan SAR).
- c. Kelompok 3 sebagai unit cadangan (*reserve command*) dan dukungan administrasi.

Pembentukan unit sub-satgas memiliki peranan penting untuk. Sebagai contoh penyelamatan di Mogadishu saat terjadi badai pada bulan Mei 2007 dan penyaluran bantuan

dari laut ke udara dari Laut Hitam ke Mogadishu dan sekitarnya pada bulan Juni 1996.

Keberadaan kelompok-kelompok sub-satgas di atas didukung Inggris melalui pengadaan peralatan berupa 16 kendaraan jenis AAS (*Amphibious Assault Ship*) yang berasal dari HMS (*His Majesty Ship*) 311 yang berlabuh di Teluk Aden. Keberadana kapal perang Inggris tersebut dilengkapi dengan kendaraan amphihi, perbekalan lapangan dan rumah sakit terapung. Keberadaan kelompok sub-satgas ini akan menjaga wilayah pantai perairan Somalia Timur untuk mengatasi penyelundupan persenjataan bagi kelompok pemberontak.

Dengan demikian maka dapat dibuktikan tentang bentuk keterlibatan Inggris dalam ikut mendukung upaya penyelesaian perang di Somalia Tahun 2006-2009.